

KULTUR DAN SIKAP KIAI TERHADAP POLITIK PRAKTIS: STUDI DI PESANTREN AL-HAMIDY DAN AL-AMIEN MADURA

Ali Ridho, Damanhuri, Luciana, Mufiqur Rahman
IAI Al-Khairat Pamekasan Madura, Instika Guluk-Guluk
Sumenep Madura, Universitas Islam Sumatera Utara, IAI Al-
Khairat Pamekasan Madura

*aldo@alkhairat.ac.id, dmanhuri@gmail.com,
mufiqurrahman@alkhairat.ac.id*

Abstract

Each kiai has a different leadership style in influencing the political culture of the pesantren. This study is to describe the politics of education in the Al-Hamidyy Banyuwang and Al-Amien Prenduan Islamic boarding schools, regarding affiliation to mass organizations and political parties. This research shows that the culture of political education at Al-Hamidyy or Banyuwang Timur and Al-Amien Islamic Boarding Schools is carried out by the two pesantren through the kiai as a passive political figure. While the Al-Amien students behaved more passively. Santri Al-Hamidyy in a practical political context follows kiai politics on the basis of *ta'diman* to teachers even though in this context there is no coercion from the kiai side.

Keywords: Culture politic, Kiai, Pesantren Al-Amien, Pesantren Banyuwang

Abstrak

Setiap kiai memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dalam mempengaruhi terhadap kultur politik pesantren. Kajian ini untuk mendeskripsikan politik pendidikan di pesantren Al-Hamidyy, Banyuwang dan Al-Amien, Prenduan, Madura tentang afiliasi pada ormas dan partai politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kultur pendidikan politik Pesantren Al-Hamidyy dan Al-Amien, dilakukan oleh kedua pesantren tersebut melalui kiai sebagai figurinya sebagai politik pasif. Hal ini berakibat pada santri Al-Hamidyy relatif lebih aktif karena mengikuti pilihan kiai. Sementara santri Al-Amien bersikap lebih pasif. Santri Al-Hamidyy dalam konteks politik praktis mengikuti politik kiai dengan dasar *ta'diman* kepada guru walaupun dalam konteks ini tidak ada paksaan dari pihak kiai.

Katakunci: kultur politik, Kiai, Pesantren Al-Amien, Pesantren Al-Hamidyy

Article History: *Received 22 August 2022, Revised: 15 Sept 2022, Accepted: 01 November 2022, Available online 01 December 2022*

Pendahuluan

Pembahasan tentang politik dan pesantren menjadi pembahasan yang menarik khususnya dalam kajian dunia pesantren. Karena politik dan pesantren adalah dua elemen dan entitas penting dalam kemasyarakatan. Politik adalah sebuah siasat yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas (Nambo, 2005: 264), sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh kiai yang memiliki kultur kepemimpinan yang berbeda sehingga mempengaruhi terhadap kultur politik pesantren. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang variatif tergantung corak kiai yang mewarnai kehidupan politik pesantren.

Beberapa penelitian politik dan pesantren akhir-akhir ditulis oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah Ahmad Ali Riyadi dengan judul pesantren dalam bingkai politik birokrasi pendidikan Islam di Indonesia. Riyadi menemukan telah terjadi perubahan orientasi politik di dunia pesantren. Perubahan orientasi ini menurut Riyadi tidak terlepas dari rekayasa politik negara sehingga pesantren yang masuk dalam sistem ini harus mengikuti kebijakan Negara. Sebab hari ini negara tidak hanya menguasai lembaga politik, namun juga menguasai lembaga sosial termasuk dunia pesantren untuk sebuah kepentingan politik (Ahmad Ali Riyadi, 2012: 91). Artinya pesantren hari ini reaktif teradap dunia perpolitikan baik pasif maupun aktif sehingga kebijakan pesantren terhadap politik menjadi pertimbangan kiai. Penelitian Riyadi tentang politik dan pesantren bisa disimpulkan bahwa keduanya sangat berkaitan dengan istilah birokratisasi pesantren.

Khorisul Wathoni menulis pesantren dalam politik kebijakan pendidikan di Indonesia. Dari judul ini sepertinya Wathoni dan Riyadi memiliki kesimpulan yang sama yaitu masuknya pesantren ke dalam lingkup birokratisasi. (Kharisul Wathoni, 2022). Dalam pandangan penulis Wathoni dan Riyadi sebenarnya melihat posisi pesantren yang tidak bisa lepas dari intervensi pemerintah sebagai sebuah realitas yang tak bisa dihindarkan

karena pesantren adalah bagian dari lembaga yang juga harus diatur oleh pemerintah. Namun dalam kebijakan pemerintah terhadap pesantren terdapat hubungan politik yang dibangun antara kiai dan penguasa. Seperti kuatnya hubungan antara politik dan pendidikan terlihat di dalam kebijakan pemerintah tentang pendidikan. (Saidin Ernas & Ferry Muhammadsyah Siregar, 2010:220).

Pesantren “tersandera politik” ini istilah penulis setelah membaca penelitian Saidin Ernas dan Ferry tentang keterlibatan pesantren dalam politik di Jogjakarta. Penelitian Saidin dan Ferry menyimpulkan secara ekstrim pertama, kualitas pesantren menurun karena kiai terlalu sibuk dengan politik praktis. Kedua, pesantren menjadi pragmatis karena politik dijadikan komoditas mencari keuntungan secara pragmatis. Ketiga, masyarakat sudah antipati terhadap pesantren yang secara aktif terlibat dalam dunia politik praktis. Ernas menyebut dengan istilah resistensi masyarakat terhadap pesantren. (Saidin Ernas & Ferry Muhammadsyah Siregar, 2010:220). Temuan ini sebenarnya dalam pandangan penulis dapat juga dirasakan di beberapa pesantren di luar Yogyakarta, namun tetap harus dilakukan kajian lebih dalam soal dampak dan resistensi yang disebut oleh Ernas dan Ferry terutama di lingkungan pulau Madura sebagai daerah yang tumbuh pesat pesantren. Apalagi Ernas dan Ferry menyebutkan pencabutan legitimasi sosial terhadap pesantren ini adalah temuan yang perlu juga dikaji di tempat lain.

Kajian tentang pesantren dan politik menurut penulis juga harus dikaji di Madura, karena di Madura pesantren adalah otoritas utama dalam konteks sosial dan keagamaan (Zainuddin Syarif & Abd Hannan, 2020:49). Pesantren memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan santri di Madura sehingga memiliki kedekatan emosional dengan para kiai dengan kata lain masyarakat Madura patuh kepada kiai (Hasanatul Janah 2019). Prastiwi dalam penelitiannya di Madura menyatakan bahwa terjadi pergeseran nilai dan fungsi kiai, menurut

Prastiwi, kiai tidak hanya berfungsi agamis namun juga politis. dalam penelitiannya terdapat kelompok masyarakat Madura yang mendukung kiai berfungsi politis namun juga ada sekelompok masyarakat yang tidak menyukai fungsi politis tersebut (Merlia Indah Prastiwi, 2015).

Sayangnya, Prastiwi tidak mengukur perbedaan persepsi kelompok masyarakat tersebut secara kuantitatif sehingga penulis tidak dapat menyimpulkan seberapa besar persepsi masyarakat terhadap fungsi kiai di Madura. Namun di akhir pernyataannya, Prastiwi memberikan harapan bahwa masyarakat Madura masih memosisikan kiai sebagai figur sentral dalam sosial keagamaan. (Merlia Indah Prastiwi, 2015). Sayangnya, Prastiwi tidak menyebutkan secara tegas afiliasi pesantren yang diteliti sehingga masih perlu dilakukan kajian lanjutan bagaimana kiai, pesantren, yang selama ini tidak berafiliasi pada ormas tertentu atau partai tertentu di Madura. Dengan sebuah pertanyaan penelitian bahwa pesantren yang sudah berafiliasi pada ormas tertentu dan pada partai tertentu sudah barang tentu atau dapat dipastikan pesantren/kiai berpolitik atau setidaknya berhubungan dengan salah satu partai politik. Bagaimana dengan pesantren yang tidak berafiliasi pada kelompok ormas manapun atau pada politik manapun? Dalam kajian penulis belum ada yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama namun melihat pada faktor afiliasi ormas dan partai di Madura.

Pada lokus yang sama, yaitu di pesantren Al-Hamidy Banyuwanyar Timur, Syaiful sebenarnya telah melakukan penelitian yang sama namun dalam kajiannya lebih menyoroti soal kesetaraan pendidikan di pesantren Banyuwanyar Timur tersebut. Syaiful juga menyinggung soal politik pesantren namun tidak menjadikan temuan bagian politik sebagai temuan utama dalam penelitiannya (Ach. Syaiful, et al, 2021).

Dari kajian tersebut, penulis melakukan sebuah kajian dengan pendekatan fenomenologi kepada pesantren yang tidak berafiliasi pada ormas dan juga partai. Dalam miniatur dan kajian akademis, penulis menjatuhkan pilihan lokus penelitian

pada pesantren Al-Hamidy Banyuanyar dan pesantren Al-Amien Prenduan yang penulis nilai adalah pesantren yang tidak berdiri di atas ormas apapun dan politik.

Kultur Politik Pendidikan Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Timur

Dalam pandangan Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, Pendidikan Islam untuk mengubah perilaku setiap individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat bahkan dalam kehidupan alam sekitarnya memerlukan cara atau siasat (Muhammad Sholeh Hoddin, 2022:19). Siasat tersebut dalam konteks kajian ini penulis sebut dengan politik pendidikan pesantren. Pernyataan ini didukung oleh pandangan Sirozi bahwa ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan (Muhammad Sholeh Hoddin, 2022:14).

Nilai politik pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Timur Pamekasan dapat dilihat dari bagaimana pola kebijakan politik pendidikan merupakan merupakan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan dan dilaksanakan oleh lembaga pelaksana pendidikan termasuk pesantren (Muhammad Sholeh Hoddin, 2022:15). Seperti yang disebutkan oleh Syaiful bahwa Netralitas Banyuanyar adalah kebijakan pesantren yang sentralistik kepada kiai. (Ach. Syaiful, et al, 2021). Santri mengikuti politik kiai dengan dasar *ta'diman* kepada guru walaupun dalam konteks ini tidak ada paksaan dari pihak kiai (Ach. Syaiful, et al, 2021).

Dalam konteks ini penulis dapat mengkontekstualisasikan temuan Prastiwi dalam penelitiannya di Madura menyatakan bahwa ternyata terdapat kelompok masyarakat Madura yang mendukung Kiai berfungsi politis namun juga ada sekelompok masyarakat yang tidak menyukai fungsi politis tersebut. (Merlia Indah Prastiwi, 2015). Santri Banyuanyar Timur adalah dalam konteks politik praktis mengikuti politik Kiai.

Kultur politik pesantren dengan terminologi politik keummatan penulis sepakat dengan temuan Syaiful bahwa pesantren Banyuanyar memiliki kultur politik keummatan (Ach. Syaiful, et al, 2021). Sebagaimana salah satu bukti politik keummatan yang dilakukan oleh pesantren ini adalah adanya forum kajian *masail diniyyah* (FKMD). Forum ini sebagaimana dijelaskan oleh informan adalah salah satu cara pesantren untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui pengajian dan tradisi keagamaan yang dilakukan di tengah masyarakat (Murtaha, 2019).

Kebijakan Politik Pesantren Al-Amien Prenduan

Pendidikan politik Tarbiyatul Mu'allimien al-Islamiyah (TMI) Al-Amien Prenduan sebagai pesantren yang netral, terbuka untuk semua golongan dan sikap multikultural yang menghormati segala perbedaan. Netralitas Pesantren Al-Amien dalam politik telah ditetapkan menjadi kebijakan (*policy*) oleh para kiai pada periode pengembangan I sampai dengan III. Kebijakan ini dikenal dengan istilah pesantren Al-Amien berdiri di atas dan untuk semua golongan (*stands and for all groups*) Artinya Pesantren ini terbuka untuk semua pihak, baik partai politik, ormas, etnis dan bahkan agama (pesantren ini menerima tamu lintas agama). Bahkan dalam konteks ini pesantren Al-Amien menyebutnya sebagai doktrin dan prinsip dasar pesantren untuk bersikap netral terhadap politik praktis. Sehingga bermula dari prinsip ini pesantren Al-Amien mengeluarkan berbagai kebijakan di antara kebijakan tersebut adalah; pesantren Al-Amien tidak berpolitik praktis baik aktif maupun pasif, termasuk seluruh warga pesantren, namun demikian, kiai pesantren ini tetap memperbolehkan para guru berpartisipasi dalam kontestasi politik dengan syarat harus berhenti sementara waktu mengajar di pesantren. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh guru yang *muqim* di lingkungan pesantren dan juga guru luar yang datang dari luar lingkungan pesantren.

Pesantren Al-Amien memang sangat hati-hati dalam urusan politik, sebab pesantren ini sudah mengikrarkan diri

untuk netral (berdiri di tengah) dalam urusan politik. Namun demikian tetap terbuka untuk semua partai politik datang ke pesantren dengan beberapa kesepakatan untuk tidak berkampanye, atau membawa simbol partai. Kami sambut hangat semua tamu dan mendoakan semua yang datang ke Pesantren, termasuk dari kalangan partai politik. (Halimi, *Wawancara*, Maret 2019)

Kehati-hatian Pesantren Al-Amien Prenduan dalam dalam konteks politik ini didalilkan betapa kiai pesantren ini dalam pidato kepesantrenan (*khutbah arsy*) atau disebut dengan kuliah kepondokpesantrenan senantiasa mengingatkan semua pihak untuk memahami pesantren kenapa tidak berpolitik praktis, kiai memantapkan sebuah prinsip pesantren (*stands and for all group*) sebagai sebuah prinsip pesantren yang harus dijaga. Pengasuh pesantren secara tegas menyatakan bahwa pesantren ini milik ummat bukan milik satu golongan, maka harus berada dan berdiri di tengah menjadi perekat umat. Pesantren Al-Amien ini menurut Kiai Mohammad Idris Djauhari meletakkan tujuan besarnya kepada para alumninya untuk menjadi perekat umat, menjadikan perbedaan sebagai sunnatullah yang harus disyukuri dan mencegah praktek-praktek destruktif akibat sebuah perbedaan dan keragaman kultur dan budaya termasuk politik (Mohammad Idris Djauhari, 2005). Kiai Mohammad Idris Djauhari yang merupakan pengasuh pesantren Al-Amien selama periode pengembangan yang meletakkan dasar prinsip (*stands and for all group*) dalam rangka menjaga pesantren sebagai lembaga perekat umat. Sehingga dalam diskusi mengenai hukum dan politik TMI pesantren Al-Amien secara holistik akan dibayang-bayangi oleh terminologi “perekat umat”.

Politik Perekat Umat

Kata perekat umat ini adalah istilah yang dipilih oleh Kiai Mohammad Idris Djauhari bukan tanpa alasan, akan tetapi ada beberapa pemikiran yang mendasar istilah tersebut diambil dan dijadikan sebuah adagium yang melakat pada jiwa Pesantren Al-Amien yang akhirnya menjadi *positioning* TMI Al-Amien dalam

bersikap secara politis baik ke luar maupun ke dalam (dalam proses pembelajaran). Peneliti menempelkan kata politik pada terminologi ini sebab memberikan acuan dan muara berpikir Kiai Mohammad Idris Djauhari dalam pengambilan kebijakan hukum politik di pesantren serta menentukan langkah metodologis dalam sebuah sistem pendidikan pesantren. Kiai Idris memilih kata perekat umat setelah berupaya mencoba mencari istilah lain dalam Islam yang kiranya cocok atau pas. Istilah tersebut diyakininya paling cocok diambil, untuk bisa dianalogikan dengan kata bersayap agar dalam pembicaraan lebih lanjut berada pada (*frame of reference*) yang sama yaitu Islam, sehingga perekat umat menjadi sebuah terminologi *qurani*. Berikut ini adalah alasan dan pemikiran Kiai Mohammad Idris Djauhari:

Secara etimologi “perekat” berarti pelaku dari kerja “melekatkan, melengketkan, atau menggabungkan” dua benda atau lebih yang sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan kata “umat” merupakan padanan kata masyarakat atau sekelompok orang, yang biasanya dipergunakan secara khusus untuk orang-orang Islam. Karena secara terminologi, kata “perekat umat” seharusnya dikonotasikan pada upaya-upaya memadukan, menyatukan, mendamaikan umat Islam yang berada pada kondisi berbeda (*ikhhtilaf*), bertikai (*tanazu*), bahkan mungkin dalam kondisi berperang atau konfrontasi fisik (*qital*). (Mohammad Idris Djauhari, *Wawancara*, 2005)

Konsep perekat umat ini ketika didialogkan dengan istilah-istilah yang ada di dalam Alquran setidaknya akan bersinggungan dengan *ta’aruf*, *silaturrahim*, dan *islah*. Istilah tersebut konotatif dan subordinatif dengan hakikat dan misi perekat umat yang diistilahkan oleh Kiai Idris dalam konteks kehidupan berpolitik, sosial dan keagamaan lebih-lebih dalam konstelasi pergaulan antar manusia (Halimi, 2019). Berikut ini adalah pemikiran dan konsep Kiai Idris dalam politik perekat umat;

Dalam pandangan Idris, politik pesantren harus mengutamakan nilai *ta'aruf* tentang situasi umat yang dihadapinya di tengah keragaman etnis dan budaya masyarakat. Karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah berkenalan dengan sebanyak-banyaknya umat dan berusaha untuk kenal dengan keadaan mereka secara mendalam, baik secara lahiriyah maupun *batiniyyah*, individual maupun sosial. Semakin banyak wilayah *ta'arufnya* semakin besar pula peluang yang dimilikinya untuk melakukan penilaian dan evaluasi sosial dan politik berdasarkan kriteria ketakwaan (Mufiqur Rahman, 2021:39).

Demikian juga, pesantren memerhatikan dan mengutamakan nilai silaturahmi. Karena pesantren memiliki hubungan yang sangat luas, hubungan dengan pemerintah, organisasi masyarakat, dan juga partai politik. Walaupun hubungan tersebut adalah hubungan kebangsaan, pesantren tidak harus masuk dalam kepentingan politik. Tapi pesantren dapat melakukan silaturahmi dengan siapa saja untuk kepentingan keummatan dan kebangsaan. Apalagi adanya perbedaan pendapat, kepentingan. Sebagaimana fungsi pesantren sebagai perekat umat, (Mohammad Idris Djauhari: 3-7). Pesantren dituntut untuk aktif dan kreatif menjalin hubungan serta menjembatani perbedaan-perbedaan (Mohammad Idris Djauhari: 3-7).

Selain silaturahmi, pesantren Al-Amien meletakkan nilai *islah* sebagai satu pondasi dan posisi yang moderat dan juga netral. Dalam konteks ini Rahman berpendapat bahwa letak netralitas pesantren memang harus dikuatkan untuk menjadikan pesantren lembaga sesuai dengan fungsinya yaitu pengayom umat. Rahman menggunakan istilah wasit, dan mediator yang hanya memihak pada kebenaran. Sehingga menurut Rahman, pesantren jauh dari anggapan-anggapan negatif dan menuai resistensi di tengah masyarakat (Mufiqur Rahman, 2021:39). Resistensi yang terjadi di tempat lain dimana pesantren tidak lagi mendapatkan kepercayaan masyarakat karena

tidak netral dan mendukung salah satu partai politik (Saidin Ernas & Ferry Muhammadsyah Siregar, 220).

Mengacu kepada konsep dan argumentasi pimpinan pesantren Al-Amien di atas, maka pesantren Al-Amien Prenduan bertindak berdasarkan tiga nilai dan fungsi perekat umat *yaitu ta'aruf, silaturrahim, dan islah*. Sebagaimana nilai tersebut menjadi dasar sikap politik pesantren Al-Amien dalam melakukan kegiatan pesantren, menjadi prinsip dan misi pesantren. Sehingga seluruh komponen dan warga pondok ini mematuhi dan dituntut melakukan fungsi *ta'aruf* tetapi pada situasi yang lain mereka dituntut melakukan fungsi sebagai penghubung (*wasilaturrahim*) atau sebagai pendamai (*al-muslih*). Baik dalam keadaan antara dua pihak yang bertikai. Tiga dimensi nilai politik dan hukum pesantren ini dalam merangkai sistem pendidikan dan pembelajaran, sehingga materi ajar juga mengacu kepada nilai-nilai tersebut. (Halimi, *Wawancara*, Juni 2019)

Hal yang digagas oleh pesantren ini adalah dalam rangka menjaga tradisi dan nilai-nilai pesantren sebagai fungsi keummatan dan religiusitas (Edi Susanto, 2007: 97).

Dari aspek ini nilai kesetaraan dalam sikap berpolitik pesantren dapat dilihat dari nilai politik perekat umat dengan tiga dimensi nilai yang telah menjadi *target of group* lembaga pendidikan yang telah disetarakan ini (*mu'adalah*) dengan sekolah formal sehingga penelitian ini akan mendiskusikan sejauh mana nilai-nilai tersebut diimplementasikan oleh para santri lebih-lebih para alumninya yang telah terjun di tengah masyarakat (Mufiqur Rahman, 2021:40).

Politik kepemimpinan melalui kaderisasi

Untuk mempertahankan estafet kepemimpinan pesantren, Al-Amien Prenduan menganut sistem kaderisasi, istilah ini dikenal dengan istilah patah tumbuh hilang berganti. Menurut Rahman, hal ini adalah bagian dari politik pesantren dengan

menjaga keberlangsungan pesantren melalui penguatan kaderisasi (Mufiqur Rahman, 2021:40). Kaderisasi ini dilakukan melalui prinsip dan nilai keadilan dan kesamaan (kesetaraan), sebab sejatinya kaderisasi adalah pola pendidikan dan pembinaan lanjutan (Tim sekretaris Pesantren Al-Amien, 2019). Walaupun politik kaderisasi ini dilakukan untuk keberlangsungan sebuah sistem kepemimpinan dan pelayanan pesantren secara estafet dan memandang semua santri memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam pendidikan kepemimpinan dan manajemen. Sehingga para santri dilatih menjadi manajer dan juga pemimpin yang juga memiliki jiwa dan nilai kesetaraan.

Sebagaimana temuan Rahman bahwa kaderisasi pada hakikatnya merupakan pendidikan dan pembinaan secara merata bagi santri. Jadi dalam kaderisasi di pesantren ini tetap mengutamakan nilai keadilan dan kesetaraan. Dengan tetap memperhatikan *masalah* pesantren maupun di tengah masyarakat sebagai perekat umat untuk menjaga keberlangsungan pesantren. Untuk itu, pesantren ini tetap menjaga sistem kaderisasi (Mufiqur Rahman, 2021; 41). Dalam pandangan penulis, pesantren di manapun pasti memperhatikan aspek kaderisasi. Namun sistem dan polanya serta kultur kaderisasi pasti tidak sama sesuai dengan kultur dan tradisi masing-masing pesantren.

Dalam konteks pesantren ini, kaderisasi dilakukan secara berkesinambungan. Sesuai dengan kultur dan tradisi pesantren, yaitu dilakukan atas dasar konsep manajemen berbasis lembaga. (Mufiqur Rahman, 2021; 42). Artinya lembaga memiliki manajemen sendiri untuk melakukan kaderisasi melalui sistem *a'wan* (para anggota) kiai. Dalam wawancara penulis, kiai yang tergabung dalam *majlis a'wan* ini bertanggung jawab menentukan arah kaderisasi, baik pimpinan maupun pengasuh.

Sebagai penegasan, hukum pengabdian sebagai salah satu rangkaian kaderisasi ini sangat penting, salah satu contoh bagaimana seorang santri Al-Amien Preduan dinyatakan tidak

dapat hak mendapat ijazah TMI karena melakukan pelanggaran hukum, yakni pelanggaran disiplin pengabdian kepada masyarakat. Santri yang tidak melakukan pengabdian atau melakukan pengabdian namun melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pengabdian seperti melanggar hukum-hukum agama, hukum budaya dan sosial akan mendapat sanksi (*punishment*) dari pesantren, jika dilakukan tergolong berat bisa jadi tidak mendapatkan ijazah TMI. (Syamsi, *Wawancara*, Juni 2019).

Hal tersebut menunjukkan betapa hukum dan politik kaderisasi melalui pengabdian masyarakat sangat ditekankan dan tidak dianggap remeh. Hal ini sesuai dengan prinsip arah pendidikan yang ditetapkan sebagai arah pendidikan oleh *target of group* TMI Al-Amien. Di sinilah hukum dan politik terjadi dialog dan koordinatif dalam rangka menetapkan dan mengokohkan suatu kebijakan TMI dalam sebuah sistem pendidikan.

Kaderisasi sejak santri kelas II Aliyah (kelas 5 TMI) sudah dilakukan, di situ diadakan kaderisasi pengurus organisasi santri Al-Amien (ISMI) yang dilakukan setiap tahun. Pergantian pengurus dilakukan oleh kelas 3 aliyah (kelas 6 TMI) yang akan fokus kepada program akhir kelas enam TMI. Tanggung jawab kepengurusan ISMI secara estafet diberikan kepada kelas lima TMI. Kelas lima sebelum menjadi pengurus ISMI harus mengikuti pelatihan manajemen dan kepemimpinan dan arahan dari para guru/ustad. Hal telah berjalan secara sistematis sesuai dengan agenda TMI. (Syamsi, *Wawancara*, Juni 2019)

Dalam hal penyusunan formatur kepengurusan ISMI dilakukan dengan cara yang cara demokratis. Setiap santri boleh mencalonkan diri sebagai ketua organisasi santri. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon formatur ketua ISMI atau calon kandidat. Para formatur diambil sesuai dengan hasil pemilihan santri. Setelah itu kiai beserta pembantunya memberikan nasehat kepada formatur terpilih oleh santri tersebut. Di sini demokrasi berbasis pesantren TMI Al-Amien dilakukan tanpa ada praktek-praktek yang melanggar hukum

fiqh atau syariat agama. Demokrasi ini disebut sebagai demokrasi terpimpin karena kiai masih memegang keputusan akhir dari sebuah kebijakan organisasi santri (ISMI). (Syamsi, *Wawancara*, Juni 2019)

Penutup

Pesantren Al-Hamidy dan Al-Amien adalah pesantren yang tidak memiliki afiliasi tertentu, baik dengan ormas maupun partai politik praktis. Politik yang dilakukan oleh kedua pesantren tersebut melalui kiai sebagai figurnya adalah politik pasif. Artinya kiai tetap mengikuti pemilihan, namun tidak menjadi *vote getter*. Namun dalam hal ini santri Al-Hamidy relatif lebih aktif karena mengikuti pilihan kiai. Sementara santri Al-Amien bersikap lebih pasif. Santri DMI al-Hamidy dalam konteks politik praktis mengikuti politik kiai dengan dasar *ta'diman* kepada guru walaupun dalam konteks ini tidak ada paksaan dari pihak kiai. Sehingga seolah-olah santri pesantren DMI Banyuwangi terlibat aktif dalam hal politik. Hal ini menarik dalam pengakuan informan yang menyatakan bahwa pada dasarnya pesantren sebagai institusi tidak terlibat dalam politik namun rasa hormat santri kepada kiai membuat apa menjadi pilihan kiai adalah sesuatu yang harus diikuti oleh santri.

Daftar Rujukan

- Djauhari, Mohammad Idris, (2005) *Alumni Pesantren sebagai perekat Umat*. Prenduan: Mutiara Press
- Ernas, Saidin & Ferry Muhammadsyah Siregar, (2010). *Dampak keterlibatan pesantren dalam politik: Studi kasus pesantren di Yogyakarta*. Kontekstualita, Vol. 25. No. 2. 2010
- Hoddin, Muhammad Sholeh, (2020) *Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Jurnal Ilmiah Iqra' Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado Volume 14 Nomor 1 202.

- Jannah, (2019) *Hasanatul Pondok pesantren sebagai pusat otoritas ulama Madura*. AL-Hikmah, Vol. 17. No. 2. Oktober.
- Maghfiroh, Nailil. et. al. (2022) *Politik Pendidikan Islam di Indonesia*. Citra Ilmu, Edisi 35 Vol XVIII Oktober 2022.
- Miles, M.B. and A.M. Huberman,(1984) *Qualitative Data Analysis* (Newbury Park, CA: Sage
- Nambo, Abdulkadir B. (2005) *Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari system politik*. Jurnal Mimbar, Volume xxi No. 2 April-Juni 2005.
- Prastiwi, Merlia Indah, (2015) *Politisasi Pesantren dan pergeseran fungsi pesantren di Madura*. Karsa, Journal of social and Islamic culture 23 (2) 208-220
- Riyadi, Ahmad Ali (2012) *Pesantren dalam bingkai politik birokrasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jurnal IAI Tribakti, Vol. 23 Nomor 1 Januaei 2012.
- Mufiqur Rahman, *etal*, (2021) *Eksplorasi nilai-nilai kesetaraan dalam pendidikan pesantren mua'dalah*. Jurnal pendidikan agama Islam journal of Islamic education studies, Vol. 8 No 1.
- Syaiful, Ach. et. al. (2021) *Equity Pedagogy di Pesantren Dirasatul Mualimin Islamiyah Al-Hamidy Banyuanyar*. FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume. 14, Nomor. 02, Desember 2021
- Syarif, Zainuddin & Abd Hannan, (2020) *Agama dan Politik: Konstelasi Pemikiran antara Kelompok Kultural dan Struktural pada Kalangan KiaiPesantren di Madura*. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 11, no. 1.
- Edi Susanto, (2007) *Revitalisasi nilai luhur Tradisi Lokal Madura* (KARSA, Vol. XII No. 2 Oktober.
- Wathoni, Kharisul, (2022) *Pesantren dalam politik dan kebijakan pendidikan di Indonesia*
- Halimi, *Wawancara*, Maret 2019
- Syamsi, *Wawancara*, Juni 2019